



(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GEDE PASEK SUARDIKA

2. Jabatan : **KEPALA BADAN**

3. NHK : **210317**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.150.000.000

- Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL
 SENDIRI Rp. 200.000.000
- Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 41 m2/41 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
- 4. Tanah dan Bangunan Seluas 28.29 m2/28.29 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 203 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
- 6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA
 BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 363 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/62 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
- Tanah Seluas 364 m2 di KAB / KOTA KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
- 11. Tanah Seluas 163 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
- 12. Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL





SENDIRI Rp. 300.000.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/21 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

501.500.000

MOBIL, HONDA HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

MOBIL, DAIHATSU SIGRA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.

C. HARTA BERGERAK L	.AINNYA	K	K	Rp.	14.400.000
D. SURAT BERHARGA	- 1	-1	-1	Rp.	
E. KAS DAN SETARA KA	AS S	KPI	KPI	Rp.	2.338.950.368
F. HARTA LAINNYA				Rp.	
Sub Total	- XPK	WOK-	WOK-	Rp.	8.004.850.368
III. HUTANG				Rp.	29.325.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAA	N (II-III)	al.	al.	Rp.	7.975.525.368

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

: PANDU YUNIANTO 1. Nama

2. Jabatan : SEKRETARIS BADAN

3. NHK : 260351

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

5.185.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.001.000.000
- Tanah Seluas 157 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
- 3. Tanah dan Bangunan Seluas 247 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.701.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN, WARISAN Rp. 721.000.000
- Tanah Seluas 249 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 401.000.000
- Tanah Seluas 249 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 401.000.000
- Tanah Seluas 249 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

283.750.000 Rp.

MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.250.000

- MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
- MOBIL, TOYOTA SEDAN COROLA ALTIS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA

520.000.000





D. SURAT BERHARGA	Rp.	400.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	769.724.817
F. HARTA LAINNYA	Rp.	al all
Sub Total	Rp.	7.158.474.817
III. HUTANG	Rp.	
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.158.474.817

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <u>elhkpn.kpk.go.id</u>. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

500.000.000

Rp.





PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GUNUNG HUTAPEA

2. Jabatan : **KEPALA PUSAT**

3. NHK : 236978

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.300.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 367 m2/369 m2 di KAB / KOTA KOTA
 TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 11 m2/34 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
- 3. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.100.000.000
- 4. Tanah dan Bangunan Seluas 342 m2/337 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HADIAH Rp. 1.100.000.000
- 5. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA
 TANGERANG SELATAN, HADIAH Rp. 1.100.000.000
- 6. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/200 m2 di KAB / KOTA
 TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

 MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

2. MOBIL, HONDA CRV CRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	-1	Rp.	10.000.000
D.	SURAT BERHARGA	KPI	Rp.	CON VER
E.	KAS DAN SETARA KAS		Rp.	6.110.985
E.	HARTA LAINNYA	101	Rp.	Coll Coll
	Sub Total		Pn	7 916 110 095





III. HUTANG Rp. 77.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.739.110.985

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NOVYANTO WIDADI

2. Jabatan : KEPALA PUSAT

3. NHK : 468164

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN 4.200.800.000

Tanah dan Bangunan Seluas 411 m2/200 m2 di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 2.750.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 13020 m2/1 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 976.500.000
- 3. Tanah dan Bangunan Seluas 3534 m2/1 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 265.050.000
- 4. Tanah dan Bangunan Seluas 2790 m2/1 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 209.250.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

491.093.185

- MOBIL, CHEVROLET TRX 14 TURBO LTZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
- MOBIL, JEEP LAND ROVER 2630 Tahun 1970, HASIL SENDIRI Rp. 136.093.185
- MOBIL, BRIO RS 1.2 CVT CKD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
- MOTOR, PIAGGIO VESPA LX 150 IE AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	190.923.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	PK KPK
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.113.995.986
E	HARTA LAINNYA	Rp.	OK OH
	Sub Total	Rp.	5.996.812.171





III. HUTANG Rp. ---IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.996.812.171

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



604.500.000

Rp.



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

Nama : MAKJEN SINAGA
 Jabatan : KEPALA PUSAT

3. NHK : **257457**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/45 m2 di KAB / KOTA BEKASI,

HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 69.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.

69.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

 C. HARTA BERGERAK LAINNYA
 Rp.

 D. SURAT BERHARGA
 Rp.

 E. KAS DAN SETARA KAS
 Rp.
 85.000.000

 F. HARTA LAINNYA
 Rp.

 Sub Total
 Rp.
 604.500.000

 III. HUTANG
 Rp.

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.







(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

 Nama : EDDY GUNAWAN 2. Jabatan : KEPALA PUSAT

NHK 204152

II. DATA HARTA

Λ	TANAH DAN BANGUNAN	Pn	3.750.000.000
М.	I ANAIT DAN DANGUNAN	IND.	3.730.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/120 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 505.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/252 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 3.245.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

16.000.000

MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI

Rp. 16.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. E. KAS DAN SETARA KAS Rp. F. HARTA LAINNYA Rp. Sub Total Rp. III. HUTANG Rp. IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp.	C.	IARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	27.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. Sub Total Rp. III. HUTANG Rp.	D.	SURAT BERHARGA	JOK JOK	Rp.	Cort Cont
Sub Total Rp. III. HUTANG Rp.	E.	(AS DAN SETARA KAS		Rp.	134.209.434
III. HUTANG Rp.	F.	IARTA LAINNYA	at at	Rp.	16 AL
at at at at at		Sub Total	Karin Karin	Rp.	3.927.209.434
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	III. HUT	NG		Rp.	40.500.000
	IV. TOTA	IL H <mark>a</mark> rta Keka <mark>y</mark> aan (II-III)	KPIL	Rp.	3.886.709.434

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.





